

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Organisasi Nirlaba**

Pontoh (2013) menyatakan bahwa organisasi nirlaba atau organisasi nonprofit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah tinggi, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institute riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Nickels, *et al.* menyatakan bahwa suatu organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang tujuan-tujuannya tidak mencakup penciptaan laba pribadi bagi pemilik atau pengelolaannya, organisasi nirlaba seringkali berusaha mencapai keuntungan finansial, tetapi keuntungan-keuntungannya tersebut digunakan untuk mencapai tujuan sosial atau pendidikan dari organisasi dan bukannya untuk kepentingan pribadi. (Mamesah, 2011)

Oleck & Stewart menyatakan bahwa entitas nirlaba atau dapat juga organisasi nonprofit adalah organisasi atau badan yang tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya dalam melayani masyarakat atau juga disebut sebagai korporasi yang tidak membagikan keuntungannya sedikit pun kepada para anggota, karyawan, serta eksekutifnya. (Repi, 2015)

Berdasarkan beberapa pengertian organisasi nirlaba berikut, arti dari organisasi nirlaba yaitu organisasi yang tidak mempunyai tujuan utama untuk mendapatkan laba (profit) dan jika terdapat adanya keuntungan maka akan digunakan untuk kelangsungan organisasi dalam melakukan aktivitas operasinya untuk umum.

Laporan keuangan organisasi nirlaba mempunyai karakteristik sebagai berikut: (IAI, 2016: 45.1-45.2)

- a. Sumber daya entitas berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika suatu entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Karakteristik tersebut memberikan akibat seperti penerimaan sumbangan, karena akan menimbulkan transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis. Namun organisasi nirlaba dalam praktiknya seringkali berbeda bentuk satu sama lain, sehingga seringkali sulit membedakannya dengan organisasi bisnis pada umumnya. (Bastian, 2010)

Mahsun (2011: 185) menjelaskan bahwa pada beberapa bentuk organisasi nirlaba, meskipun tidak adanya kepemilikan, organisasi tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan organisasinya dari pendanaan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran pemasukan kas menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya. Organisasi seperti ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan organisasi bisnis umumnya.

Perbedaan yang mendasar diantara organisasi nirlaba dengan organisasi bisnis dikarenakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membuat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 yang mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dalam PSAK No. 45 dinyatakan bahwa tujuan adanya standar akuntansi keuangan tersebut adalah sebagai pengaturan dalam pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba lebih relevan, lebih mudah dipahami, dan memiliki daya banding tinggi, dijelaskan sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi yang relevan akan bercirikan memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap. (Mahsun, 2011: 35)

b. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.(Nordiawan, 2009: 38)

c. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Sehubungan dengan hal ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.(Nordiawan, 2009: 38)

Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lainnya(Suwardjono, 2003: 65). Mardiasmo (2002: 160) menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa perlu dibuat laporan keuangan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Sebagai bagian dari usaha untuk membuat kerangka konseptual, *Financial Accounting Standards Board* (FASB, 1980) mengeluarkan *Statement of Financial Accounting Concepts No. 4* (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (*objectives of finansial reporting by nonbusiness*

*organizations*). Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah:(Mardiasmo, 2002: 167)

- a. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
- b. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.
- c. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
- d. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
- e. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.

- f. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
- g. Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

Menurut PSAK No. 45 tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan adanya informasi yang lebih relevan dalam memenuhi kepentingan para penyumbang, kreditur, anggota organisasi, ataupun pihak lain yang memberikan sumberdaya bagi organisasi nirlaba. Pihak yang menggunakan laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka untuk menilai:

- a. Jasa yang telah mereka berikan kepada organisasi nirlaba dan kemampuan organisasi nirlaba untuk terus memberikan jasa tersebut.
- b. Cara manajer dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.

Secara rinci, tujuan laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai: (Mahsun, 2011: 189-190)

- a. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi.
- b. Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih.
- c. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya.

- d. Cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya.
- e. Usaha jasa suatu organisasi.

### **2.1.2. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)**

Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Akuntansi memiliki kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya, kerangka dasar konseptual yang dimaksudkan terdiri dari standar teknik atau prinsip dan praktek yang telah diterima masyarakat umum karena kelogisan dan kegunaannya. Standar teknik atau prinsip itu disebut dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Nurlaela (2014) mengatakan bahwa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sangat penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti, dan dapat diperbandingkan. Standar Akuntansi Keuangan mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (*Standard Setting Body*) pada saat tertentu. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disusun oleh lembaga Ikatan Akuntan Indonesia yang selalu mengacu pada teori-teori yang berlaku dan memberikan tafsiran dan penalaran yang mendalam dalam pembuatan laporan keuangan untuk memperoleh informasi yang akurat. Keberadaan SAK dibutuhkan untuk membentuk kesamaan prosedur dalam menjelaskan bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tersebut dalam berbagai aktivitas bisnis di Indonesia, mengatur adanya perlakuan akuntansi yang menyeluruh. Standar-standar dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tersebut dipergunakan dalam pengaturan dan perlakuan akuntansi dari awal sampai pada tujuan akhir yaitu untuk mengatur pelaporan terhadap pengguna, mengatur pengukuran, mengatur penyajian dan mengatur pelaporan atas keuangan perusahaan. Standar-standar tersebut juga mengatur pedoman pengakuan akuntansi untuk setiap bagian-bagian akuntansi mulai dari perolehan, penggunaan, sampai pada saat penghapusan. Standar Akuntansi Keuangan yang terdapat di Indonesia meliputi:

a. PSAK-IFRS

PSAK-IFRS adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – *Internasional Financial Reporting Standards*. Pada PSAK ini diwajibkan untuk diterapkan dalam entitas dengan akuntabilitas publik seperti Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. Tujuan dari PSAK ini adalah untuk memberikan informasi yang lebih relevan bagi para pemakai laporan keuangan.

b. SAK-ETAP

SAK-ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang dipergunakan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Maksud Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah suatu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan serta yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.



c. PSAK Syariah

PSAK Syariah digunakan untuk suatu badan atau entitas yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah. Dalam PSAK Syariah ini dilakukan prinsip PSAK umum namun berbasis syariah dalam pengembangannya dan adanya acuan fatwa MUI.

d. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. SAP ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah untuk entitas pemerintah yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

### **2.1.3. PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba**

Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 8 April 2011. PSAK 45 (2011) menggantikan PSAK 45 (1997) Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. (IAI, 2016: 45.1)

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan adanya informasi yang lebih relevan dalam memenuhi kepentingan para penyumbang yang menyediakan sumberdaya bagi organisasi nirlaba dan tidak mengharapkan adanya pengembalian. Laporan keuangan yang relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dengan membantu mereka dalam mengoreksi hasil evaluasi mereka pada masa lalu atau masa kini, serta memprediksi masa depan dan pada akhirnya para pengguna mampu memberikan keputusan selanjutnya.

Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sebagai berikut:

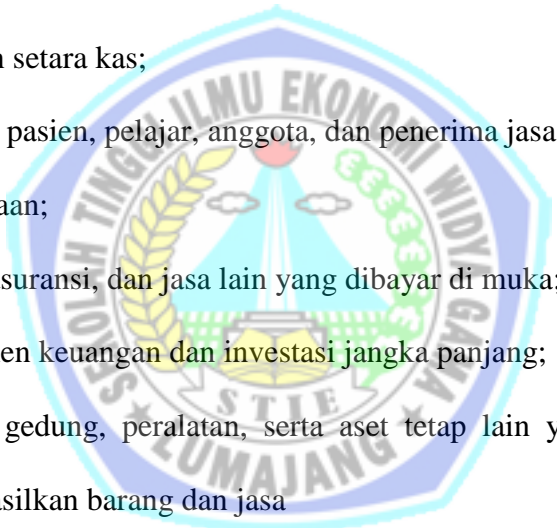
a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan dalam organisasi nirlaba memiliki fungsi dan bentuk yang sama dengan laporan posisi keuangan dalam organisasi bisnis. Perbedaan terletak pada istilah aktiva bersih pada organisasi nirlaba yang merupakan ekuitas pada organisasi bisnis. Laporan posisi keuangan tidak menggunakan istilah ekuitas karena tidak adanya unsur kepemilikan modal dalam organisasi. Aktiva bersih atau aset neto yang dimaksudkan adalah sebagai sumber dana yang diterima oleh organisasi baik dari sumbangan maupun penghasilan yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan organisasi.

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk memberikan adanya informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto serta informasi mengenai hubungan diantara unsur tersebut pada saat tertentu. Informasi dalam suatu laporan posisi keuangan ataupun dalam laporan keuangan lain menggunakan pengungkapan yang dapat membantu pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali seperti kreditur, anggota, ataupun pihak lain. Informasi untuk menilai adanya kemampuan entitas nirlaba dalam memberikan suatu jasa secara berkelanjutan dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Didalam laporan posisi keuangan terdapat komponen klasifikasi aset, liabilitas, dan aset neto adalah sebagai berikut:

### 1) Klasifikasi aset dan liabilitas

Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aset dan liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, entitas nirlaba biasanya melaporkan masing-masing unsur aset dalam kelompok yang homogen, seperti: (IAI, 2016: 45.3)

- 
- a) Kas dan setara kas;
  - b) Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain;
  - c) Persediaan;
  - d) Sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar di muka;
  - e) Instrumen keuangan dan investasi jangka panjang;
  - f) Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lain yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa

Laporan posisi keuangan menyajikan secara terpisah kas dan aset lain yang penggunaannya telah dibatasi oleh penyumbang yang tidak mengharapkan adanya pembayaran kembali dengan kas dan aset lain yang tidak terikat penggunaannya.

Informasi likuiditas disajikan dengan cara sebagai berikut:

- a) Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo.
- b) Mengelompokkan aset ke dalam kelompok lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam kelompok jangka pendek dan jangka panjang.

- c) Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh tempo liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, dalam catatan atas laporan keuangan.

2) Klasifikasi aset neto terikat atau tidak terikat

Laporan posisi keuangan menyajikan adanya jumlah setiap kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan adanya pembayaran kembali, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi adanya sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer disajikan jumlahnya dalam laporan posisi keuangan. Aset neto terikat permanen, terikat temporer dan tidak terikat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Aset neto permanen adalah aset neto yang terdapat adanya pembatasan dalam penggunaan sumber dayanya. Aset neto permanen ditetapkan oleh pemberi sumber daya agar aset atau sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi atau entitas diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan ataupun manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber tersebut. Pembatasan permanen terhadap aset, seperti tanah atau karya seni yang diberikan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan tidak untuk di jual, ataupun aset yang didapatkan untuk investasi yang akan mendatangkan pendapatan secara permanen dapat disajikan sebagai unsur yang terpisah dalam kelompok aset neto yang penggunaannya dibatasi secara permanen dan disajikan ke dalam catatan atas laporan keuangan. Pembatasan permanen

kelompok kedua tersebut berasal dari hibah atau wakaf dan warisan yang menjadi dana abadi.

- b) Pembatasan temporer adalah pembatasan sumber daya yang menetapkan agar penggunaan sumber daya dari penyumbang harus mampu untuk dipertahankan sampai pada periode tertentu ataupun sampai terpenuhinya keadaan tertentu yang telah ditetapkan oleh penyumbang. Pembatasan temporer terhadap sumber daya berupa aktivitas operasi tertentu, investasi untuk jangka panjang tertentu, penggunaan selama periode tertentu di masa depan atau pemerolehan aset tetap, dapat dijadikan sebagai unsur-unsur yang terpisah dari setiap kelompok aset neto yang penggunaannya di batasi secara temporer oleh penyumbang, yang tidak mengharapkan adanya pembayaran kembali dan dapat berbentuk seperti pembatasan waktu ataupun pembatasan penggunaan atau keduanya.
- c) Aset neto tidak terikat pada umumnya meliputi pendapatan dari jasa, penjualan barang, sumbangan, dan deviden atau hasil investasi, dikurangi oleh beban untuk memperoleh adanya penerimaan kas atau pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset neto tidak terikat dapat berasal dari kebijakan organisasi nirlaba tersebut dan informasi mengenai adanya batasan aset neto tidak terikat pada umumnya disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

## b. Laporan Aktivitas

Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI (2016: 45.4) menyatakan bahwa tujuan laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan aset neto; hubungan antar transaksi dan peristiwa lain; dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dalam pengungkapan informasi laporan keuangan lainnya, yang dapat membantu pemberi sumberdaya, yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, kreditur, anggota ataupun pihak lain untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode; menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dan memberikan jasa; dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Komponen di dalam laporan aktivitas dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Perubahan Kelompok Aset Neto

Laporan aktivitas menyajikan adanya perubahan jumlah aset bersih selama satu periode. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada ekuitas dalam posisi keuangan. Laporan aktivitas menyediakan jumlah perubahan aset neto terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat selama satu periode.

### 2) Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah dalam aset neto tidak terikat, kecuali jika adanya pembatasan dalam penggunaannya dari pemberi sumber daya, yang tidak mengharapkan adanya pengembalian dan menyajikan beban sebagai pengurang dalam aset neto tidak terikat. Sumber daya disajikan sebagai penambah aset neto tidak terikat, terikat permanen atau terikat temporer,

tergantung pada ada ataupun tidaknya pembatasan. Jika sumber daya terikat pembatasannya tidak diberlakukan lagi di periode yang sama, maka dapat disajikan sebagai sumber daya tidak terikat selama disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi dalam organisasi nirlaba. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan ataupun kerugian yang diakui dari hasil investasi dan aset lain atau liabilitas sebagai penambah atau pengurang dalam aset neto tidak terikat, kecuali jika terdapat adanya pembatasan dalam penggunaannya.

### 3) Informasi pendapatan dan beban

Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan ataupun beban secara bruto kecuali jika diatur berbeda oleh SAK atau SAK ETAP. Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau peristiwa lain yang berada diluar pengendalian entitas nirlaba dan manajemen. Misalnya, keuntungan dan kerugian penjualan tanah dan gedung yang tidak digunakan lagi. (IAI, 2016: 45.5)

### 4) Informasi pemberian jasa

Laporan aktivitas atau dalam catatan atas laporan keuangan menjelaskan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsionalnya, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Klasifikasi secara fungsional dimaksudkan untuk membantu agar pemberi sumber daya mampu menilai pemberian jasa dan penggunaan sumber daya yang telah diberikan. Dan penyajian klasifikasi beban secara fungsionalnya, organisasi nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, gaji, sewa, listrik, bunga, dan penyusutan.

Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau nilai entitas nirlaba. Pemberian jasa tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui berbagai program utama. (IAI, 2016: 45.6)

Aktivitas pendukung yaitu yang tergolong dengan seluruh aktivitas selain program pemberian jasa. Umumnya, aktivitas pendukung meliputi aktivitas manajemen dan umum, pencairan dana, dan pengembangan anggota. Aktivitas manajemen dan umum meliputi pengawasan, manajemen bisnis, pembukuan, penganggaran, pendanaan, dan aktivitas administrasi lain, serta semua aktivitas manajemen dan administrasi kecuali program pemberian jasa atau pencairan dana. Aktivitas pencairan dana berupa publikasi dan kampanye pencairan dana; pengadaan daftar alamat pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali; pelaksanaan acara khusus pencairan dana; pembuatan dan penyebaran manual, petunjuk, dan bahan lain; dan pelaksanaan aktivitas lain dalam rangka pencairan dana dari individu, yayasan, pemerintah, dan lain-lain. Dan aktivitas pengembangan anggota berupa pencairan anggota baru dan pengumpulan iuran anggota, hubungan dan aktivitas sejenis.

### c. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah memberikan adanya informasi mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas dalam satu periode. Penyajian arus kas masuk dan keluar digolongkan dalam tiga kategori aktivitas yang dijalankan organisasi, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.



- 1) Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama yaitu pendapatan dari dalam suatu organisasi dan aktivitas lain yang merupakan penambahan atau pengurangan arus kas yang terjadi dan terkait dengan kegiatan operasional organisasi.
- 2) Aktivitas investasi adalah semua penerimaan dan pengeluaran dalam kas terkait dengan aset jangka panjang serta investasi organisasi.
- 3) Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penciptaan atau pelunasan kewajiban ataupun hutang organisasi dan kenaikan/penurunan aset neto.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan kas dan pengeluaran kas sesuai dengan PSAK 2 tentang Laporan Arus Kas sebagai berikut (IAI, 2016: 45.6):

- 1) Aktivitas pendanaan:
  - a) Penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang.
  - b) Penerimaan kas dari pemberi sumber daya dan penghasilan investasi yang, penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan pembangunan dan pemeliharaan aset tetap atau peningkatan dana abadi.
  - c) Bunga dan deviden yang dibatasi penggunaannya dalam jangka panjang.
- 2) Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas misalnya sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan memberikan kejelasan yang secara naratif atau rincian jumlah-jumlah yang telah disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak sesuai dengan kriteria pengakuan yang ada dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi tambahan mengenai ketidakjelasan pada laporan keuangan yang ada dalam laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas.



## e. Contoh Format Laporan Keuangan PSAK No.45

## 1) Format Laporan Posisi Keuangan

Tabel 2.1. Contoh Format Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS NIRLABA, Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2 dan 20X1 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	xxx	xxx
Piutang bunga	xxx	xxx
Persediaan dan biaya dibayar dimuka	xxx	xxx
Piutang lain-lain	xxx	xxx
Investasi jangka pendek	xxx	xxx
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset tetap	xxx	xxx
Investasi jangka panjang	xxx	xxx
<i>Jumlah Aset</i>	xxx	xxx
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka pendek</b>		
Utang dagang	xxx	xxx
Pendapatan diterima dimuka yang dapat dikembalikan	xxx	xxx
Utang lain-lain	xxx	xxx
Utang wesel	xxx	xxx
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Kewajiban tahunan	xxx	xxx
Utang jangka panjang	xxx	xxx
<i>Jumlah Liabilitas</i>	xxx	xxx
<b>ASET NETO</b>		
Tidak terikat	xxx	xxx
Terikat temporer	xxx	xxx
Terikat permanen	xxx	xxx
<i>Jumlah Aset Neto</i>	xxx	xxx
<i>Jumlah Liabilitas, dan Aset Neto</i>	xxx	xxx

Sumber: IAI, 2016

## 2) Format Laporan Aktivitas

Tabel 2.2. Contoh Format Laporan Aktivitas

ENTITAS NIRLABA	
Laporan Aktivitas untuk tahun berakhir pada 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)	
<b>PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT</b>	
<b>Pendapatan</b>	xxx
Sumbangan	xxx
Jasa layanan	xxx
Penghasilan investasi jangka panjang	xxx
Penghasilan investasi lain-lain	xxx
Penghasilan neto investasi jangka panjang belum direalisasi	xxx
Lain-lain	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
<b>Aset Neto yang Berakhir Pembatasannya:</b>	
Pemenuhan program pembatasan	xxx
Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan	xxx
Berakhirnya pembatasan waktu	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
<i>Jumlah pendapatan</i>	xxx
<b>Beban</b>	
Program A	xxx
Program B	xxx
Program C	xxx
Manajemen dan umum	xxx
Pencairan dana	xxx
Jumlah beban	xxx
Kerugian akibat kebakaran	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
<b><i>Kenaikan (penurunan) aset neto tidak terikat</i></b>	xxx
<b>PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT TEMPORER</b>	
Sumbangan	xxx
Penghasilan investasi jangka panjang	xxx
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang	xxx
Kerugian aktuarial untuk kewajiban umum	xxx
Aset neto terbebaskan dari pembatasan	xxx
<b><i>Kenaikan (penurunan) aset neto terikat temporer</i></b>	xxx
<b>PERUBAHAN ASET NETO TERIKAT PERMANEN</b>	
Sumbangan	xxx
Penghasilan investasi jangka panjang	xxx
Penghasilan neto terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang	xxx
<b><i>Kenaikan (penurunan) aset neto terikat permanen</i></b>	<b>xxx</b>

<b>KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO</b>	<b>xxx</b>
<b>ASET NETO AWAL TAHUN</b>	<b>xxx</b>
<b>ASET NETO AKHIR TAHUN</b>	<b>xxx</b>

---

Sumber: IAI, 2016



## 3) Format Laporan Arus Kas (Metode Langsung)

Tabel 2.3. Contoh Format Laporan Arus Kas

ENTITAS NIRLABA	
Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)	
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>	
Kas dan pendapatan jasa	XXX
Kas dan pemberi sumber daya	XXX
Bunga dan dividen yang diterima	XXX
Penerimaan lain-lain	XXX
Bunga yang dibayarkan	XXX
Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan supplier	XXX
Utang lain-lain yang dilunasi	XXX
<i>Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi</i>	XXX
<b>AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	XXX
Pembelian peralatan	XXX
Penerimaan dari penjualan investasi	XXX
Pembelian investasi	XXX
<i>Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi</i>	XXX
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Penerimaan dari kontribusi terbatas dari:	XXX
Investasi dalam endowment	XXX
Investasi dalam endowment berjangka	XXX
Investasi bangunan	XXX
Investasi perjanjian tahunan	XXX
Aktivitas pendanaan lain:	XXX
Bunga dan dividen terbatas untuk diinvestasi	XXX
Pembayaran kewajiban tahunan	XXX
Pembayaran utang wesel	XXX
Pembayaran liabilitas jangka panjang	XXX
<i>Kas neto yang diterima (digunakan) untuk aktivitas pendanaan</i>	XXX
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS</b>	XXX
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	XXX
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	XXX

Sumber: IAI, 2016

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian pada objek PSAK No. 45, tetapi belum terdapat yang mengimplementasikan pada laporan keuangan Poliklinik Kesehatan.

Sutarti (2007) telah melakukan penelitian analisis PSAK No. 45 dalam penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba. Dalam penelitian ini, menggunakan metode studi deskripsi, penyajian laporan keuangan pada Rumah Sakit "X" periode 31 desember 2004 dan 31 Desember 2005 telah sesuai dengan penerapan PSAK No. 45, yang mana komponen laporannya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pontoh (2013) telah melakukan penelitian penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 pada Gereja BZL. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Gereja Bukit Zaitun Luwuk (Gereja BZL) belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan organisasi nirlaba yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 dikarenakan untuk penyusunan laporan keuangan telah diatur tersendiri sesuai dengan Tata Dasar dan Peraturan Gereja.

Mamesah (2011) telah melakukan penelitian penerapan PSAK No. 45 pada GMIM Efrata Setrum Sonder kaitannya dengan kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, GMIM Efrata Setrum Sonder belum menerapkan PSAK

No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada penyajian laporan keuangannya dari segi format laporan keuangan maupun penyusunannya. Gereja hanya menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran yang sesuai dengan pedoman yang disusun Badan Pekerja Majelis Sinode dalam Tata Gereja yang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 disebut sebagai laporan aktivitas.

Nurlaela (2014) telah melakukan penelitian implementasi PSAK No. 45 dalam pelaporan keuangan entitas nirlaba berstatus badan layanan umum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian peneliti, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM) Surakarta telah menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 dan Ketentuan yang Berlaku bagi Badan Layanan Umum yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Tinungki (2014) telah melakukan penelitian analisis penerapan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan PSAK No. 45 pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana. Dalam penelitian ini, Panti Sosial Tresna Werdha Hana belum menerapkan format yang sesuai dengan penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba yang berdasarkan PSAK No. 45. Panti Sosial Tresna Werdha Hana hanya menyajikan format laporan keuangan yang sesuai dengan pemahaman mereka, namun secara umum tujuan penyusunan laporan keuangannya berjalan dengan baik.

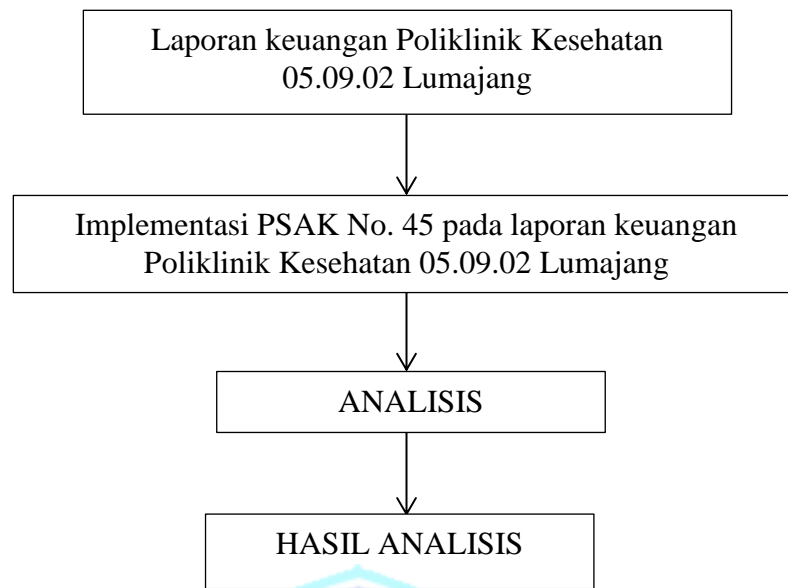


Repi (2015) telah melakukan penelitian analisis penerapan PSAK No. 45 (revisi 2011) tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba pada STIKES Muhammadiyah Manado. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, STIKES Muhammadiyah Manado belum menerapkan penyusunan format laporan keuangan yang sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45, dikarenakan STIKES Muhammadiyah dalam penyusunannya hanya berupa neraca saldo yang mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari yayasan. STIKES Muhammadiyah Manado juga belum menilai penyusutan aset, namun baru mencatatnya dalam bentuk inventaris.

### **2.3. Kerangka Penelitian**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 adalah standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dengan adanya penerapan PSAK nomor 45 didalam laporan keuangan organisasi nirlaba, laporan keuangan menjadi lebih relevan dalam memberikan informasi kepada kreditor, anggota organisasi, ataupun pihak lain yang memberikan adanya sumber daya untuk organisasi nirlaba.

Organisasi nirlaba perlu memberikan informasi keuangan berupa laporan keuangan organisasi nirlaba tersebut yang sesuai dengan standar pelaporan keuangan organisasi nirlaba kepada sumber daya agar mampu menilai kinerja organisasi tersebut. Dan organisasi nirlaba perlu untuk menyusun laporan keuangan yang akuntabilitas agar memberikan informasi yang relevan, dapat di pahami dan memiliki daya banding tinggi. Secara konseptual, kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

Sumber: Hasil Olah Data, 2019

